

KOTA MADIUN



RLPPD

TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA MADIUN

**RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH**

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, akhirnya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Madiun Tahun 2019 dapat terselesaikan dengan baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disamping merupakan aktualisasi dari penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, juga merupakan media evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, penyelenggaraan urusan desentralisasi dan penyelenggaraan tugas pembantuan yang dilaksanakan Kota Madiun pada tahun 2019, dan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan terselesaikannya Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Madiun Tahun 2019 ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas sumbang saran dan pemikiran. Semoga dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembinaan lebih lanjut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, akuntabel, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi segala upaya kita dalam rangka **Mewujudkan Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera.**

Sekian terima kasih.

Wassalamu' alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Madiun, Maret 2020

WALIKOTA MADIUN

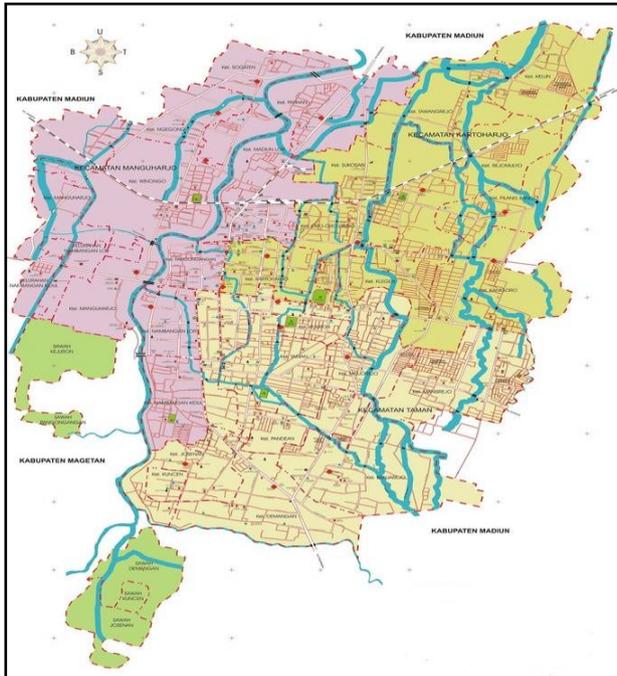


Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

A. PENDAHULUAN

KONDISI GEOGRAFIS

Berdasarkan RTRW Kota Madiun Tahun 2010-2030, Kota Madiun memiliki wilayah seluas 33,23 km² yang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo.



Kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Madiun adalah Kecamatan Taman dengan luasan sebesar 12,46 km² (37,50%), disusul Kecamatan Kartoharjo seluas 10,73 km² (32,29%), dan Kecamatan Manguharjo seluas 10,04 km² (30,21%).

Berikut ditampilkan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di tiap kecamatan di Kota Madiun, yaitu :

- Kecamatan Manguharjo terdiri dari 324 RT dan 88 RW ;
- Kecamatan Taman terdiri dari 392 RT dan 105 RW ;
- Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 309 RT dan 74 RW.

KONDISI DEMOGRAFIS

Jumlah penduduk Kota Madiun tahun 2019 berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun adalah sebanyak 210.115 jiwa. Dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 102.851 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 107.264 jiwa. Sedangkan jumlah Kepala Keluarga di Kota Madiun sebanyak 71.995 KK tersebar di tiga wilayah kecamatan.

Jumlah penduduk Kota Madiun Tahun 2019 menurut jenis kelamin, dan jenis pekerjaan sebagaimana tabel berikut

Tabel I.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan
Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Manguharjo	30.824	32.193	63.017
2.	Taman	43.751	45.599	89.350
3.	Kartoharjo	28.276	29.472	57.748
Jumlah		102.851	107.264	210.115

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

Tabel I.4
Jumlah Kepala Keluarga (KK) Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan
Tahun 2019

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Manguharjo	16.400	5.875	22.275
2.	Taman	22.805	7.154	29.959
3.	Kartoharjo	14.963	4.798	19.761
Jumlah		54.168	17.827	71.995

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

Tabel I.7
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2019

NO	Nama Pekerjaan	Jumlah
1	Belum/ Tidak Bekerja	36.390
2	Mengurus Rumah Tangga	34.412
3	Pelajar/ Mahasiswa	44.940
4	Pensiunan	6.095
5	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	6.826
6	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1.771
7	Kepolisian RI (POLRI)	1.027
8	Jasa	8.653
9	Karyawan	46.311
10	Buruh/ Tukang	4.390
11	Wiraswasta	18.994
12	Lain	306
Jumlah		210.115

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Madiun

LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI

Untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karesidenan Madiun yang meliputi Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, dan Kota Madiun, pertumbuhan ekonomi Kota Madiun selama kurun waktu 2015-2019 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah tersebut. Data tersebut mengindikasikan bahwa Kota Madiun merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah barat Provinsi Jawa Timur.

Tabel I.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
Di Wilayah Karesidenan Madiun Tahun 2015-2019

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019**
Kota Madiun	6,15	5,91	5,93	5,96	5,69
Madiun	5,26	5,27	5,42	5,10	
Magetan	5,17	5,30	5,09	5,25	
Ngawi	5,08	5,21	5,07	5,26	
Pacitan	5,10	5,21	4,98	5,51	
Ponorogo	5,25	5,29	5,10	5,31	

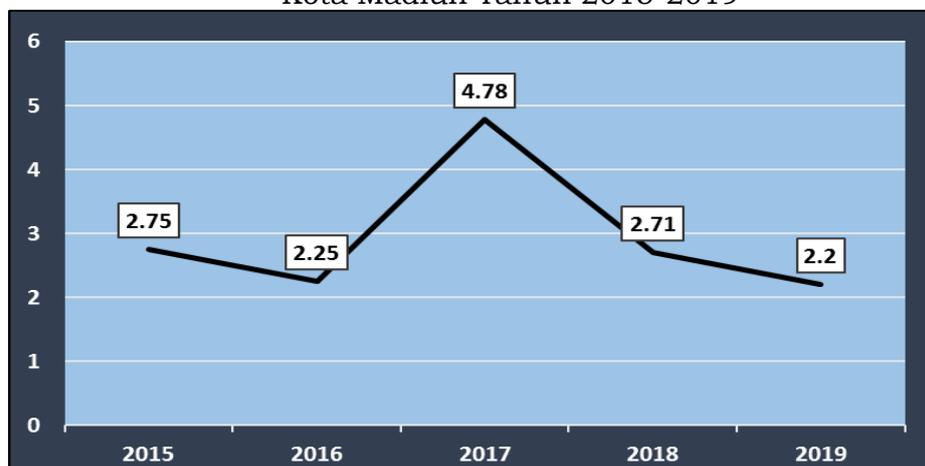
Sumber : BPS Kota Madiun

**) Angka Sementara

INFLASI

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup masyarakat. Kestabilan dan pengendalian inflasi perlu dijaga agar pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Grafik I.1
Perkembangan Tingkat Inflasi
Kota Madiun Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kota Madiun

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang telah berjalan di daerah tersebut. Selain itu, IPM juga menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Peningkatan atau penurunan angka IPM merupakan indikasi keefektifan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah pada kurun waktu tertentu.

Tabel I.13
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2015-2019

Kabupaten/ Kota	2015	2016	2017	2018	2019**
Kabupaten Pacitan	64,92	65,74	66,51	67,33	68,16
Kabupaten Ponorogo	68,16	68,93	69,26	69,91	70,56
Kabupaten Madiun	69,39	69,67	70,27	71,01	71,69
Kabupaten Magetan	71,39	71,94	72,60	72,91	73,69
Kabupaten Ngawi	68,32	68,96	69,27	69,91	70,41
Kota Madiun	79,48	80,01	80,13	80,33	80,88
Jawa Timur	68,95	69,74	70,27	70,77	71,50

Sumber : BPS Kota Madiun

**) Angka Sangat Sementara

KEMISKINAN

Pengentasan kemiskinan selalu menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Berbagai upaya nyata di berbagai bidang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun demi tercapainya upaya pengentasan kemiskinan, mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, berbasis pemberdayaan masyarakat serta pemberdayaan usaha kecil.

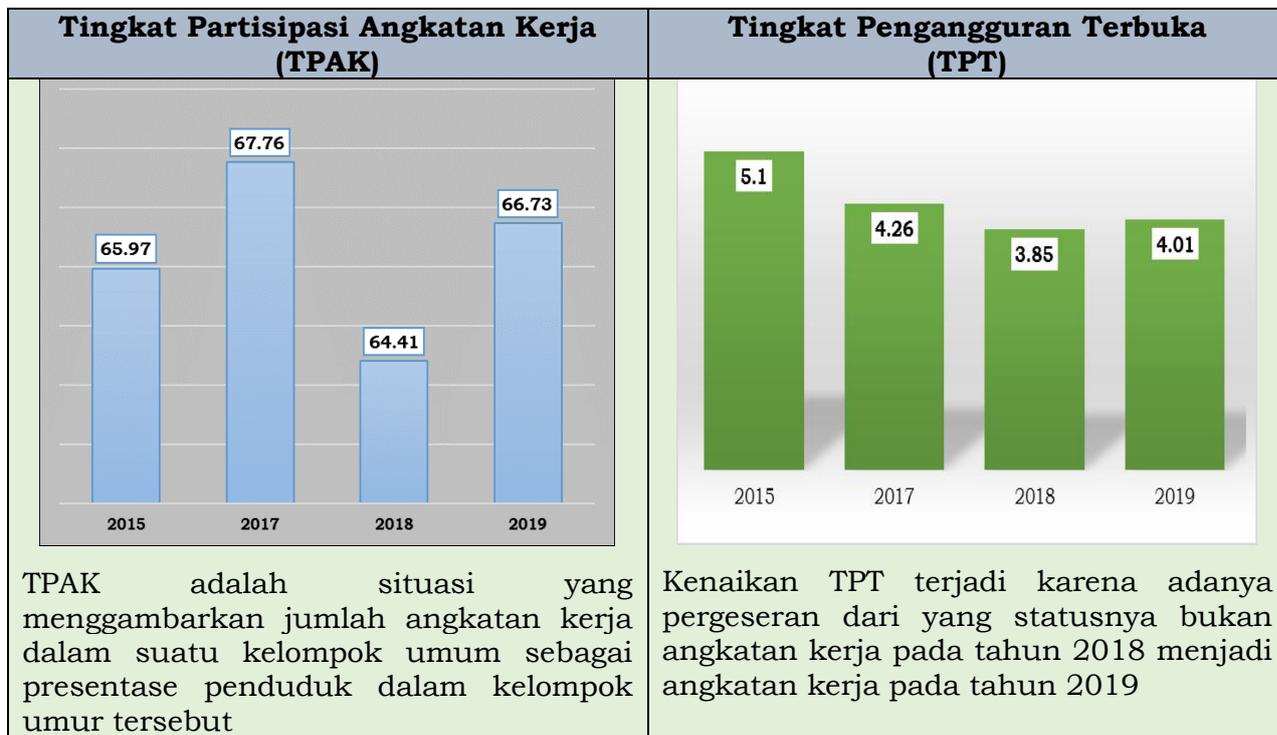
Tabel I.17
Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Madiun

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2015	359.771	8.550	4,89
2016	376.956	9.050	5,16
2017	404.959	8.700	4,94
2018	446.525	7.920	4,49
2019*	468.304	7.690	4,35

Sumber : BPS Kota Madiun

Tren penurunan kemiskinan di Kota Madiun hingga tahun 2019 terus menunjukkan kinerja yang sangat baik karena pada tahun ini kembali terjadi penurunan persentase penduduk miskin hingga level 4,35%, meski pada 2015 dan 2016 sempat mengalami sedikit kenaikan.

KETENAGAKERJAAN



B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

VISI MISI

“Terwujudnya Kota Madiun Yang Lebih Maju Dan Sejahtera”

Sebagai penjabaran visi, dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat (Partisipatoris).
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan dan pemeratakan tingkat kesejahteraan masyarakat

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2019

1. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM serta percepatan penanggulangan kemiskinan ;
2. Peningkatan Infrastruktur untuk peningkatan pertumbuhan Ekonomi dan Sanitasi Kota untuk meningkatkan kualitas hidup ;
3. Peningkatan daya saing perekonomian daerah ;
4. Peningkatan ketahanan pangan serta kualitas lingkungan hidup ;
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses.

RINGKASAN APBD

Tabel II.1
Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2018 s.d. 2019

No	Uraian	Realisasi Tahun 2018	Target Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019
I	Pendapatan	1.007.446.240.137,64	1.100.017.042.506,00	1.094.312.970.048,58
1	PAD	230.847.977.146,73	226.448.081.506,00	252.048.556.223,83
2	Dana Perimbangan	678.417.066.007,00	733.188.381.000,00	681.537.181.650,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	98.181.196.983,91	140.380.580.000,00	160.794.406.072,37
II.	Belanja	1.036.658.830.595,88	1.377.795.868.937,22	1.148.509.555.883,37
1	Belanja Tidak Langsung	407.189.652.660,00	544.763.013.542,14	406.498.199.329,08
2	Belanja Langsung	629.469.177.935,88	833.032.855.395,08	742.013.356.554,29
	Surplus/ (defisit)	(29.212.590.458,24)	(277.778.826.431,22)	(54.129.411.307,17)
III	Pembiayaan			
1	Penerimaan Pembiayaan	308.491.416.889,46	279.278.826.431,22	279.278.826.431,22
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	308.491.416.889,46	277.778.826.431,22	277.778.826.431,22
	SILPA	279.278.826.431,22		223.649.415.124,05

Sumber : BPKAD Kota Madiun

C. URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	88,30%
2	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	88,05%
3	Persentase Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	70,96%
4	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100%
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	135,75%
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	170,76%
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0%
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0%
9	Persentase pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	97,75%
10	Persentase pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	98,92%
11	Persentase SD dan SMP Terakreditasi	99%
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	111,35%
15	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,28%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Madiun

2. URUSAN KESEHATAN

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,47%
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	100%
3	Rasio Tenaga Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk Kota	84,62
4	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
5	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,04%
6	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
7	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,12%
8	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,51%
9	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	107,18%

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
10	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	93,20%
11	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	89,21%
12	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	106,54%
13	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	107,44%
14	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	83,43%
15	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	103,70 %
16	Persentase Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100%
17	Persentase Balita Gizi Buruk/ <i>Stunting</i> yg mendapatkan Perawatan/Pelayanan Kesehatan	100%
18	Persentase penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100%

Sumber :Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Panjang jalan Kota dalam kondisi baik	99,67 %
2	Persentase Panjang Jalan Kota yang di rehabilitasi/direkonstruksi	76,27 %
3	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	78,98 %
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	95,67 %
5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99 %
6	Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	82 %
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0%
8	Rumah Tangga Bersanitasi	99,00%
9	Rumah tangga pengguna air bersih	99,71 %
10	Kawasan Kumuh	0%
11	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah	20,01%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Madiun

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(3)	(4)	(5)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	0%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota	0%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,05%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	100 %
6	Rumah layak huni	99,95 %

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	3.350 orang
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	870 orang
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	390 orang
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100%
8	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	7,32%

Sumber Data : Satpol PP dan BPBD Kota Madiun

6. URUSAN SOSIAL

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	115,7%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	0%
3	Rasio rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar dengan Jumlah Penyandang Diabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gepeng	1,9%
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	49%
5	Rasio pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	50,9%

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Madiun

7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENAGAKERJAAN

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	84,6%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	7,70%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	11.570,32%
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	78%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	85,52%
6	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	100%
7	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	50%
8	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	100%

Sumber : Dinas Tenaga Kerja

8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3,01%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	0,01%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	10,255
4	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%
5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	93,81%

Sumber : Dinas Sosial, PP dan PA Kota Madiun

9. URUSAN PANGAN

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	154,44 kg/kapita/th
2	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	100%
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0%
5	Luas lahan bersertifikat	98,20%
6	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0%
7	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun

11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	63,87
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kota	94,001%
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	0%

Sumber Data: DLH Kota Madiun

12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	98,50%
2	Persentase Penduduk berumur dari 17 tahun ke atas yang mempunyai KTP Elektronik	98,22%

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun

13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	0%
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	100%
3	PKK aktif	100%
4	Posyandu	98,15%

Sumber Data : Bagian Adm. Pemerintahan Umum, Dinas Sosial dan PPPA, Dinas Kesehatan

14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,94
2	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	0,45%
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	78,8%
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	4,2%

Sumber : Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun

15. URUSAN PERHUBUNGAN

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Rasio konektivitas Kota	0
2	Kinerja lalu lintas Kota	0,45

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Madiun

16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota	36,95%
4	Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada
5	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	28,57%

Sumber : Diskominfo Kota Madiun

17. URUSAN KOPERASI DAN UKM

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	48,70 %
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	0,46 %
3	Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	25,81 %
4	Koperasi aktif	98,05 %

Sumber : DPM PTSP KUKM Kota Madiun

18. URUSAN PENANAMAN MODAL

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Persentase peningkatan investasi di Kota	0,20%

Sumber Data : DPM PTSP, Koperasi dan UKM

19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,25%
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,31%
3	Peningkatan prestasi olahraga	50
4	Persentase Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	100%

Sumber: Dinas Budparpora Kota Madiun

20. URUSAN STATISTIK

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%

Sumber : Diskominfo Kota Madiun

21. URUSAN PERSANDIAN

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	30,44%

Sumber : Diskominfo Kota Madiun

22. URUSAN KEBUDAYAAN

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	14,38%
2	Penyelenggaraan festival seni & budaya	58

Sumber Data: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

23. URUSAN PERPUSTAKAAN

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Nilai Budaya Baca	54,99
2	Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	100%
3	Koleksi buku yg tersedia di perpustakaan daerah	42,5%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

24. URUSAN KEARSIPAN

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	75%
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	70%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota (sumber data: one data KKP)	361,3 ton
2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Nihil

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

2. URUSAN PARIWISATA

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1,4%
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kota	2,23%
3	Tingkat hunian akomodasi	78,87%
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	8,67%
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	489,4%

Sumber Data : Disbudparpora Kota Madiun

3. URUSAN PERTANIAN

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	7,21 ton
2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2019	0,75%
3	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	27,5%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

4. URUSAN PERDAGANGAN

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2019	26,06%
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	99,99%
4	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	97,05 %

Sumber : Dinas Perdagangan Kota Madiun

5. URUSAN PERINDUSTRIAN

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Pertambahan jumlah industri besar di kota	7,438%
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun

6. URUSAN TRANSMIGRASI

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya dan pembinaannya	0%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun

FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kota	89
2	Penjabaran program RPJMD dalam RKPD	100%
3	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	43,66%
4	Rasio PAD	1,77%
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	32,45%
6	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,0375
7	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	
8	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%
9	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	3,93%
10	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	83,35
11	Persentase Pegawai Fungsional terhadap Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah daerah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	5,35%
12	Persentase Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	65,48 %
13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	110,78%
14	Assets management	Ya
15	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	21,57%
16	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	96,13%
17	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100%

Sumber Data: Sekretariat Daerah, BPKAD, Inspektorat, BKPD, Diskominfo, Bappeda

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

NO.	IKK	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)
1	Kegiatan pembinaan politik di daerah	1 kegiatan
2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	10 kegiatan

Sumber Data: Bakesbang Kota Madiun

D. REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Madiun merupakan integrasi kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan capaian kinerja program dan kegiatan daerah serta permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi. Dengan memperhatikan dan mengacu pada tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Jawa Timur dan arahan kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Madiun tahun 2014-2019 serta mempertimbangkan eksistensi kondisi dan potensi daerah Kota Madiun, maka tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Madiun Tahun 2019 adalah **“Pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal dan pelayanan publik”**.

Tabel IV.1

Prioritas Nasional/Prioritas Provinsi/Prioritas Kota/Program Prioritas

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN	PROGRAM PRIORITAS KOTA MADIUN
1	2	4	6	7
1	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM serta percepatan penanggulangan kemiskinan	Program Pendidikan Anak Usia Dini
				Program Pendidikan Dasar
				Program Pendidikan Non Formal
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
				Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
				Program upaya kesehatan masyarakat
				Program pencegahan dan pengendalian penyakit
				Program Peningkatan Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan
				Program penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan BLUD
				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata
	Program keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera			

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN	PROGRAM PRIORITAS KOTA MADIUN
1	2	4	6	7
				Program pelayanan rehabilitasi dan pemberdayaan kesejahteraan sosial
2	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	Pemerataan pembangunan antar wilayah melalui pengembangan infrastruktur ekonomi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan	Peningkatan Infrastruktur untuk peningkatan pertumbuhan Ekonomi dan Sanitasi Kota untuk meningkatkan kualitas hidup	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program peningkatan kualitas pembangunan gedung dan infrastruktur kota Program pengendalian banjir Program pembangunan saluran/drainase/ gorong-gorong; Program lingkungan sehat perumahan Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas LLAJ Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan pelayanan angkutan
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produksi	Peningkatan agroindustri melalui nilai tambah pengembangan agromaritim serta akselerasi kepariwisataan	Peningkatan daya saing perekonomian daerah	Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Program peningkatan pelayanan perizinan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja Program Perlindungan dan Pengembangan kelembagaan Ketenagakerjaan Program ketrasmigrasian Program Stabilisasi Ekonomi Daerah Program Pengembangan Sistem Pendukung kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pengembangan industri kecil menengah Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN	PROGRAM PRIORITAS KOTA MADIUN
1	2	4	6	7
				Program Pembinaan PKL dan Asongan
				Program pengelolaan pasar rakyat
				Program Peningkatan dan pengembangan ekspor serta Efisiensi Perdagangan dalam Negeri
				Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
				Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa
				Program pengembangan data / informasi / statistik daerah
				Program Pengembangan Tata Kelola Persandian
				Program Penyelamatan, Peningkatan SDM dan Layanan Arsip Daerah
4	Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air	Peningkatan ketahanan pangan dan energi serta tata kelola sumber daya air dan pelestarian sumber daya alam lingkungan hidup berkelanjutan	Peningkatan ketahanan pangan serta kualitas lingkungan hidup	<p>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> <p>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</p> <p>Program peningkatan produksi hasil peternakan dan pelayanan kesehatan hewan</p> <p>Program peningkatan produksi dan pengolahan / pemasaran hasil perikanan</p> <p>Program perencanaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang</p> <p>Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</p> <p>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</p> <p>Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup</p> <p>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</p> <p>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</p>

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN	PROGRAM PRIORITAS KOTA MADIUN
1	2	4	6	7
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Lingkungan Hidup
5	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	Peningkatan ketentraman dan ketertiban serta kesuksesan pelaksanaan Pemilu	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang sukses	<p>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan</p> <p>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan</p> <p>Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan</p> <p>Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan dan anak</p> <p>Program implementasi sistem informasi administrasi kependudukan</p> <p>Program pelayanan dan penataan administrasi pencatatan sipil</p> <p>Program pelayanan dan penataan administrasi kependudukan</p> <p>Program penyelenggaraan kelurahan</p> <p>Program penataan daerah otonom baru</p> <p>Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah</p> <p>Program penataan peraturan perundang-undangan</p> <p>Program peningkatan ketatalaksanaan perangkat daerah</p> <p>Program pengembangan kinerja dan kelembagaan perangkat daerah</p> <p>Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah</p> <p>Program peningkatan manajemen pelayanan kepegawaian</p> <p>Program pembinaan dan pengembangan aparatur</p>

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN	PROGRAM PRIORITAS KOTA MADIUN
1	2	4	6	7
				Program penataan aparatur
				Program fasilitasi kesejahteraan PNS
				Program peningkatan kapasitas SDM aparatur
				Program pengembangan kajian dan penelitian
				Program perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
				Program perencanaan pembangunan ekonomi
				Program perencanaan pembangunan prasarana wilayah
				Program perencanaan pembangunan daerah
				Program peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
				Program Peningkatan fasilitasi pengadaan barang dan jasa
				Program peningkatan kapasitas DPRD
				Program peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
				Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
				Program percepatan tindak lanjut hasil pengawasan
				Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
				Program peningkatan dan pengembangan penatausahaan keuangan daerah
				Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset daerah
				Program Pengelolaan Anggaran Daerah
				Program Peningkatan Pendataan dan Potensi Pajak Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KOTA MADIUN	PROGRAM PRIORITAS KOTA MADIUN
1	2	4	6	7
				Program peningkatan pelayanan dan manajemen pengelolaan pajak daerah
				Program pendidikan politik masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
				Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
				Program pengembangan wawasan kebangsaan
				Program pembinaan pemuda dan olah raga
				Program pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
				Program Peningkatan Kualitas Hidup Beragama
				Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Walikota
				Program Pemberdayaan Satuan polisi pamong praja dalam Pelaksanaan Tugas
				Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
				Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
				Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal
				Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Alam
				Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
				Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban

E. TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan bertujuan memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

1. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Madiun

A. DASAR HUKUM

Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur No : SP DIPA - 018.11.3.059444/2019 tanggal 5 Desember 2018

B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

Instansi yang memberikan tugas pembantuan adalah Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan dari Badan Ketahanan Pangan yang dananya bersumber dari APBN melingkupi :

1. Program :

Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

2. Kegiatan :

Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL)

D. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Lokasi

Kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2019 dilaksanakan di Kota Madiun pada 2 Kecamatan.

2. Waktu

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, kegiatan Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pekarangan dengan Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2019 dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2019.

E. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN YANG DIGUNAKAN

Sebesar Rp 75.000.000,00 kepada kelompok Konsep Rumah Pangan Lestari (KRPL) penerima manfaat sebagai berikut:

1. Kelompok KRPL Permata Hijau Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo ;
2. Kelompok KRPL Mulya Sejahtera Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo ;
3. Kelompok KRPL Wanita Niti Boga Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman ;
4. Kelompok KRPL Respati Manis Hijau Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman ; dan
5. Kelompok KRPL Sukokaryo Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman.

2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

A. DASAR HUKUM

Melaksanakan program prioritas Nasional , yaitu :

1. Program Keluarga Harapan (PKH)
 - a. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016;
 - c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ;
 - d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan;
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016;
 - d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ;

- e. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai

3. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

- a. Undang Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
- b. Undang Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c. Undang Undang No 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit
- d. Undang Undang No: 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013
- e. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
- f. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- g. Peraturan presiden No. 34 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan organisasi Kementerian Negara
- h. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.
- i. Peraturan menteri Kesehatan No. 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Kesehatan
- j. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 374 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional

B. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN

1. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program dari Kementerian Sosial RI
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program dari Kementerian Sosial yang merupakan program lintas kementerian dibawah koordinasi Menko PMK
3. Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan program dari Kementerian Kesehatan dan Kemensos RI

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Pemberian Bantuan Sosial bersyarat untuk keluarga tidak mampu dengan indeks bantuan sesuai jumlah kategori yang ada dalam satu keluarga. Keluarga dengan komponen Kesehatan sejumlah Rp. 2.400.000/tahun/kategori. Keluarga dengan komponen pendidikan

sejumlah Rp. 900.000/tahun/ kategori anak SD,sejumlah Rp. 1.500.000/tahun/kategori anak SMP dan sejumlah Rp 2.000.000,-/tahun/kategori anak SMA. Sedangkan keluarga dengan komponen Kesejahteraan Sosial mendapat bantuan sejumlah Rp 2.400.000/tahun/kategori Disabilitas atau Kategori Lansia.

Jumlah Penerima Manfaat PKH Kota Madiun pada tahun 2019 sebanyak 3.269 keluarga.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Pemberian bantuan pangan dengan mekanisme non tunai sejumlah Rp. 110.000/bulan/keluarga. Jumlah Penerima manfaat BPNT Kota Madiun sejumlah 4.833 keluarga.

3. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Merupakan jaminan sosial bagi masyarakat tidak mampu yang memberikan jaminan pemberian layanan pengobatan gratis kelas 3 untuk 29.201 jiwa penduduk Kota Madiun. Bidang sosial bertanggung jawab terhadap verifikasi dan validasi penerima manfaat KIS.

D. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Jumlah KPM PKH pada akhir tahun 2019 sebanyak 3.269. Penyaluran bantuan telah dilakukan sesuai dengan tahapan dengan realisasi : ada 1 KPM yang belum menerima bantuan dikarenakan terdapat perbedaan data rekening yang ada diKPM dengan data yang ada pada system bank.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan rutin diterima setiap bulan sebesar Rp 110.000,-

E. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN YANG DIGUNAKAN

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Sumber Anggaran : APBN

Jumlah Anggaran : Rp. 10.900.350.000,-

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Sumber Anggaran : APBN

Jumlah Anggaran : Rp. 6.379.560.000,-

F. HAL LAIN YANG DIANGGAP PERLU DILAPORKAN

a. Program Keluarga Harapan (PKH)

- PKH bertujuan untuk memberikan transfer sosial bagi orang miskin dan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan

dengan memberikan insentif pada keluarga miskin untuk berinvestasi dalam modal sumber daya manusia anak-anak mereka;

- PKH mempromosikan perubahan sosial melalui
- Insentif perubahan perilaku melalui prasyarat kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak dan ibu hamil atau ibu menyusui untuk pencairan bantuan
- Memfasilitasi sesi FDS yang di antaranya berfokus pada mempromosikan pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih baik, praktik pengasuhan, perilaku kesehatan
- Memberikan layanan inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas berat

b. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
- Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai;
- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

c. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Memberikan jaminan kesehatan yang komprehensif (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif), berjenjang (rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas, rawat jalan spesialis di rumah sakit dan rawat inap di rumah sakit), tanpa batasan nilai rupiah.

Mengganti biaya layanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis pasien, tetapi membatasi jenis layanan (kosmetika dan fertilitas) dan tanpa iur biaya (peserta tidak harus membayar biaya apapun). Jenis pelayanan yang dicakup relatif komprehensif termasuk layanan kasus katastrofik seperti operasi jantung, hemodialisa dan operasi cesar, sehingga upaya mencapai kesejahteraan masyarakat terus menjadi prioritas utama pemerintah.

F. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. KERJASAMA ANTAR DAERAH

- a. Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah, Nomor : 120.23/34/033.4/KSB/2019 dan Nomor : 130/1/401.011/2019 ;
- b. Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Peningkatan Program Puskesmas Tahun 2019, Nomor : 120.23/39/PKS/033.4/2019 dan Nomor : 440/04/401.013/2019 ;
- c. Kesepakatan Bersama dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kota Madiun, Nomor : 39/KOMINFO/HK.03.02/05/2019 dan Nomor : 130/5/401.011/2019 ;
- d. Kesepakatan Bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Nomor : 130/10/401.011/2019 dan Nomor : KEP-366/WPJ.24/2019.

2. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

- a. PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Area Madiun dalam hal pemungutan dan penyetoran pajak penerangan jalan serta rekening listrik pemerintah Kota Madiun ;
- b. Lembaga Pengabdian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya perihal Peningkatan Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa ;
- c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, Tingkat III dan Tingkat IV dengan pola kemitraan ;
- d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta dalam bidang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dengan pola Kontribusi ;
- e. Lembaga Diklat yang terakreditasi dalam bidang Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

- f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam bidang Assessment Kompetensi bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;
- g. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Madiun dalam bidang penunjukan Bank sebagai penempatan rekening kas umum daerah Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2019 ;
- h. P3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta perihal Pembahasan dan Pengkajian Raperda tentang Sistem Kesehatan Daerah, Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dan Perda tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis ;
- i. LPPM Universitas Bhayangkara (UBHARA) Surabaya perihal Pengkajian dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun Tahun 2018 oleh DPRD Kota Madiun ;
- j. LPPM Universitas Wisnuwardhana Malang perihal Pengkajian dan pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Madiun Tahun 2018 oleh DPRD Kota Madiun ;
- k. LPPM Universitas Wisnuwardhana Malang perihal Pengkajian dan pembahasan KUA-PPAS Kota Madiun Tahun 2020 oleh DPRD Kota Madiun ;
- l. LPPM Universitas Wisnuwardhana Malang perihal Pengkajian dan pembahasan KUPA PPAS-P dan RKPD Perubahan Kota Madiun Tahun 2019 oleh DPRD Kota Madiun ;
- m. P3KHAM LPPM Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta perihal Pendampingan penyusunan rancangan peraturan DPRD Kota Madiun tentang tata tertib DPRD oleh tim penyusun rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Kota Madiun ;
- n. Organisasi Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Madiun dalam bidang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin
- o. Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun dalam bidang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin ;
- p. Kantor Pertanahan Kota Madiun, Kerjasama Bidang Pertanahan ;
- q. PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Madiun dalam bidang Pelayanan Kelistrikan ;

- r. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dalam bidang Elektronifikasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Optimalisasi Penerimaan Daerah di Kota Madiun ;
 - s. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Madiun dalam bidang Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah ;
 - t. LPPM ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) Surabaya bidang kerjasama Perjanjian kerjasama Swakelola Non Swadana ;
 - u. Fakultas Teknik Universitas PGRI Madiun (UNIPMA) berupa kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi (TI) dan komunikasi.
3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
- a. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Madiun dengan Kepolisian Resort Madiun Kota ;
 - b. Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai BUMD ;
 - c. Forum Koordinasi TPID, DBHCHT, Tim Percepatan Berusaha, KUR dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat ;
 - d. Forum Pendampingan pengelolaan keuangan daerah dengan Kejaksaan Negeri Kota Madiun ;
 - e. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forum Kewaspadaan Dini dan Tim Terpadu Penanganan Konflik dengan Ketua DPRD, KODIM 0803, Polresta, Kejaksaan Negeri, Kantor Imigrasi, Kantor Bea Cukai, dan Lanud Iswahyudi ;
 - f. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) dengan Kantor Pertanahan Kota Madiun terkait pemanfaatan ruang atas permohonan masyarakat ;
 - g. Koordinasi persiapan pelatihan SKT dan Workshop/Pelatihan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara dengan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Kementerian PUPR, Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV, DJBK serta Kementerian PUPR.
4. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA
- a. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya.
Selama Tahun 2019, di wilayah Kota Madiun telah terjadi bencana sebanyak :

No.	Nama Bencana	Jumlah kejadian	Ket.
1.	Angin Puting Beliung/Angin Kencang	72 kali	
2.	Kebakaran	38 kali	
3.	Pencarian dan Pertolongan	41 kali	
4.	Banjir/Genangan Air	33 kali	
5.	Kekeringan	2 kali	
6.	Sosial	1 kali	

Penanganan bencana melalui kegiatan Mitigasi Penanggulangan Bencana berupa Pelatihan SAR (Search and Rescue) agar petugas lebih tanggap, tangguh, sigap dan responsif dalam menjalankan tugas demi kemanusiaan.

b. Status Bencana

Bencana yang terjadi di Kota Madiun pada umumnya masih termasuk dalam kategori status lokal/kota karena dampak yang ditimbulkan kecil atau tidak terlalu besar dan tidak berakibat fatal serta mampu diatasi Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun.

c. Sumber dan Jumlah Anggaran

Rp. 2.350.428.000,00 dari Dana APBD Kota Madiun

d. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

- Piket siaga bencana ;
- Patroli kebencanaan ;
- Bersih bersih sungai ;
- Penyuluhan atau Sosialisasi Penanggulangan Bencana ;
- Mitigasi Penanggulangan Bencana.

e. Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi

Berdasarkan informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Klas I Juanda disampaikan bahwa memasuki awal musim hujan di Wilayah Jawa Timur termasuk Kota Madiun curah hujan cukup tinggi, disertai petir dan angin, maka diprediksi potensi bencana yang terjadi adalah banjir local.

G. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

1. BIDANG KESEHATAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan yang tertuang adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN INDIKATOR SPM
	INDIKATOR	TARGET DAERAH	
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100,04%
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100,12%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	97,51%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	107,18%

JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN INDIKATOR SPM
	INDIKATOR	TARGET DAERAH	
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	93,20%
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	89,21%
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetus Melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	106,54%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	107,44%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	83,43%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	103,70%

2. BIDANG PENDIDIKAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan Dasar
- b. Pendidikan kesetaraan
- c. Pendidikan anak usia dini

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Data Tahun 2018	Target Tahun 2019	Capaian Indikator SPM
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	140,16	100	116,68
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	0,65
3.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	106,7	100	88,30

3. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Bidang Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Data Tahun 2018	Target Tahun 2019	Capaian Indikator SPM
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/ atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	100	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	100	100	0

4. BIDANG PEKERJAAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Data Tahun 2018	Target Tahun 2019	Capaian Indikator SPM
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	94,28	95	95.67
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	98,87	98	99

5. BIDANG SOSIAL

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia telantar di Luar Panti
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Luar Panti
- e. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Data Tahun 2018	Target Tahun 2019	Capaian Indikator SPM
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	32	66	167,27
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	10	45	300
3.	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	134	161	404,97
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	140	38	135,21

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Data Tahun 2018	Target Tahun 2019	Capaian Indikator SPM
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	0	90	0

6. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota, adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Data Tahun 2018	Target Tahun 2019	Capaian Indikator SPM
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	0%	0%	100%
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%

SUB URUSAN BENCANA DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan informasi rawan bencana
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Data Tahun 2018	Target Tahun 2019	Capaian Indikator SPM
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100	100	100

H. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Madiun Tahun 2019 disajikan sebagai berikut :

Tabel
Pengukuran Realisasi Kinerja 2019

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Misi 1 : Mewujudkan Pembangunan berbasis pada Partisipasi Masyarakat					
1.1.1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam Pembangunan	Presentase Usulan Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	81%	81,13%	100,16%
1.1.2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,89	94,05	100,27%
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa					
2.1.1	Meningkatnya tata kelola birokrasi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB	B	96%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	79,5	88,45	111,26 %
2.1.2	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	100%
		Tingkat keterbukaan informasi publik	A	A	100%
Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar					
3.1.1	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,76	0,77	101,30%
3.1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,59 tahun	72,75 tahun	100,20%
3.1.3	Meningkatnya kualitas infrastruktur, permukiman dan prasarana transportasi kota	Rasio Panjang Jalan Kota dalam kondisi baik	93%	93,64%	100,69%
		Rasio Rumah layak Huni	99,42%	99,95%	100,53%
		Persentase Penurunan Angka Kecelakaan	1,50%	1,64%	100,69%
3.1.4	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,51	63,80	93,13%
		Persentase pemanfaatan ruang sesuai RTRW	100%	100%	100%
Misi 4 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat					
4.1.1	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif dan penyerapan tenaga kerja	Persentase pertumbuhan nilai investasi	3,14%	0,63%	20%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,08	4,01	121,06%
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor unggulan daerah	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	23,86%	25,93%	108,70%
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	17,2%	17,68%	103,70%
		Persentase pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6,29%	8,95%	142,36%
4.1.3	Meningkatnya keamanan, ketertiban dan kerukunan dalam masyarakat	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	98%	100%	102,04%
		Persentase potensi konflik yang diselesaikan	100%	100%	100%

I. PENGHARGAAN TINGKAT NASIONAL YANG DITERIMA TAHUN 2019

TINGKAT NASIONAL :

1. Predikat Kota Layak Anak Tingkat Nasional
2. Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)
3. Penghargaan Pembina Forum Anak Terbaik Tingkat Nasional
4. Wahana Tata Nugraha Tahun 2019
5. Piagam WTP dari BPK RI
6. Penghargaan Swasti Saba Wistara
7. Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi Kemenpan dan RB (Dinas Kependudukan dan Capil)
8. Penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Sangat Baik” dari Kementerian PAN dan RB (Dinas Kependudukan dan Capil)
9. Penghargaan Top 30 Kompetisi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR! Kemenpan RB
10. Juara I Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat Nasional untuk TK/RA kategori Pencapaian Terbaik (TK Negeri Pembina)
11. Juara Sekolah Sehat Tingkat Nasional (TK Pembina)
12. Piagam Penghargaan Clinical Service Improvement Project untuk RSUD Kota Madiun dalam rangka PERSI Award

13. Penghargaan Menteri Kominfo Jonny G Plate atas Penyelesaian Masterplan Smart City
14. Rating Kota Cerdas Indonesia 2019 kategori Smart Health dan RKCI 2019 kategori Digital Government Readiness
15. Juara I Lomba Best Practice Kepala Sekolah Dasar kategori Naskah Terbaik (Kepala SDN Mojorejo 2)
16. Juara 1 Dalang Mumpuni Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional
17. Juara Penyaji Catur Terbaik Festival Dalang Bocah Tingkat Nasional
18. Juara II Tingkat Nasional Festival dan *Lomba* Seni Siswa Nasional kategori Solo Vokal (pelajar SMP St. Yusuf)

TINGKAT PROVINSI :

1. Juara II Predikat Kota Ramah Lansia Tingkat Provinsi
2. Juara III Kategori Infografi pada Anugerah Pewarta Warga (APW) Award Tingkat Provinsi
3. Juara III Lomba Cerdas Cermat Komunikatif (LCKK) tingkat Provinsi Jawa Timur (KIM Anyelir)
4. Juara III Duta Putri Gemar Makan Ikan Tingkat Provinsi Jawa Timur
5. Penghargaan BBGRM kategori Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur (Kelurahan Nambangan Kidul)
6. Program Unggulan Radio LPPL Terbaik dalam Anugerah Penyiaran KPID Award Provinsi Jawa Timur
7. Juara III Kelompok Usaha Bersama (Kube) Tingkat Provinsi Jawa Timur (Kube PKH Abadi Jaya, Kelurahan Pandean)
8. Juara III Pendamping Kube Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Timur (Fepi Aryani, Peksos Supervisor PKH Kota Madiun)
9. Juara III Lomba Cerdas Cermat Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
10. Juara I Yel-Yel Keluarga Sadar Hukum Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
11. Keterbukaan Informasi Publik Kategori A (Informatif) PPID Award Provinsi Jawa Timur 2019

PENUTUP

Demikian Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kota Madiun terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan Tahun Anggaran 2019 dengan tingkat capaiannya. Guna menyempurnakan dan memperbaiki pelaporan pencapaian kinerja, Pemerintah Kota Madiun sangat mengharapkan adanya peningkatan kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dalam bentuk :

1. Partisipasi stakeholder, yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi pemerintah pusat di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat, untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat sehingga dalam pengambilan kebijakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Daerah ;
2. Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun maupun Pemerintah Provinsi dan Pusat serta penyelarasan dengan Program Pemerintah Kota Madiun dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan perumusan Kebijakan Pemerintah Kota Madiun yang berkenaan dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kota Madiun di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk Mewujudkan Pemerintahan Bersih Berwibawa Menuju Masyarakat Sejahtera.

Segala saran, kritik dan masukan tentang Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Walikota Madiun Periode Tahun 2019 dari masyarakat diberikan waktu selama 30 hari dan dapat disampaikan ke Pemerintah Kota Madiun melalui :

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kota Madiun, Jalan Pahlawan No.37 Madiun
2. Email : Bagpem.kotamadiun@gmail.com